

MANUSIA INDONESIA DALAM DIMENSI SOSIOLOGI BUDAYA

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat radikal di segala lini kehidupan. Baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara seakan-akan terputus dengan sejarah masa lalu, dimana nilai-nilai ideologi bangsa, sosial, budaya, dan nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya, kebinekaan dalam kesatuan mulai memudar, dan pembangunan spiritual serta material belum mencapai tujuan yang diinginkan karena berjalan tersendat-sendat. Meminjam istilah Endang Sumantri, bangsa Indonesia mengalami masa-masa *discontinue, unlinier, dan unpredictable* (www.setneg.go.id).

Kondisi seperti ini memicu masyarakat untuk bertindak anarkis dalam menampakan antisosial dan antikemapanan, berdemonstrasi dengan cara merusak. Para pejabat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi atau menyelewengkan amanahnya. Tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa, maraknya penggunaan dan peredaran narkoba dan pornografi yang mengancam masa depan remaja sebagai generasi masa depan bangsa. Para pengadil yang diadili, aparat keamanan yang diamankan, serta para politisi dan elit kekuasaan yang tidak peduli dengan etika berpolitik dan nasib rakyatnya yang kesusahan.

Di daerah tertentu muncul keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena ketidakpuasan terhadap pembagian

“kue” pembangunan dari pusat. Nilai-nilai nasionalisme pun turut melemah, Pancasila sudah mulai jarang dibicarakan dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan (Asshiddiqie, 2009: 40). Kondisi tersebut di atas kalau dicermati karena lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta moralitas bangsa yang buruk. Lebih khususnya adalah karena sumber daya manusia Indonesia yang mengalami penurunan kualitas hidupnya.

KONDISI MANUSIA INDONESIA

Membicarakan manusia Indonesia berarti membicarakan masyarakat Indonesia. Gambaran umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau pluralistis. Kemajemukan masyarakat dapat dilihat dari segi horizontal seperti perbedaan etnis, bahasa daerah, agama, dan geografis maupun dari segi vertikal, seperti perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi dan tingkat sosial budaya (Usman Pelly & Asih Menanti, 1994: 13). Manusia Indonesia yang diinginkan adalah manusia seutuhnya yaitu manusia yang dididik untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, makhluk sosial, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhannya dalam mengejar kemajuan dan kebahagiaan rohaniah (ibid: 14).

Faktor manusia menjadi ujung tombak mencegah keterpurukan bangsa-negara. Sumber daya manusia adalah kunci sehingga perlu dipersiapkan secara terstruktur dan terencana. Repotnya pengembangan kompetensi dan karakter manusia Indonesia kurang mendapat perhatian serius, tidak hanya tecermin dalam penganggaran, tetapi juga dalam pengembangan praksis pendidikan.

Banyak dari kalangan ilmuwan dan budayawan Indonesia yang mengenali sisi-sisi negatif manusia Indonesia, diantaranya uraian "manusia Indonesia"-nya Mochtar Lubis dan "mental menerabas"-nya Koentjaraningrat.

Melihat fenomena kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari cita-cita pembangunan Indonesia, Mochtar Lubis secara lisan pada tahun 1977, menyebut enam ciri manusia Indonesia. Meliputi hipokrit alias munafik (1), enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya (2), berjiwa feodal (3), percaya takhayul (4), artistik (5), dan berwatak lemah (6).

Ketika tahun 1982 Mochtar Lubis diminta merefleksikan kembali "manusia Indonesia", dengan tegas ia mengatakan tidak ada perubahan, semakin parah. Andaikan permintaan itu disampaikan kembali, di saat Mochtar Lubis sudah tiada (meninggal 2 Juli 2004), niscaya ia menangis di alam baka.

Koentjaraningrat (2004: 37-38) menyatakan, manusia Indonesia mengidap mentalitas yang lemah, yaitu konsepsi atau pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran masyarakat, karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya (*culture value system*) sejak beberapa generasi yang lalu, dan yang baru timbul sejak zaman revolusi yang tidak bersumber dari sistem nilai budaya pribumi. Artinya, kelemahan mentalitas manusia Indonesia diakibatkan oleh dua hal yaitu karena sistem nilai budaya negatif yang berasal dari bangsa sendiri dan dari luar akibat dari penjajahan bangsa lain. Koentjaraningrat (2004: 45) memperinci kelemahan mentalitas manusia Indonesia, diantaranya: (1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu; (2) sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) sifat tak percaya kepada diri

sendiri; (4) sifat tak berdisiplin murni; (5) sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Mansyur Semma (2008) mengutip pendapat Samuel P. Huntington tentang kondisi masyarakat yang mempersubur korupsi. Korupsi cenderung meningkat dalam periode pertumbuhan dan demokratisasi yang cepat karena perubahan nilai dan sumber-sumber baru kekayaan dan kekuasaan.

Ryan Sugiarto (2009: 11-13) memperinci watak negatif manusia Indonesia dengan mengemukakan 55 kebiasaan kecil yang menghancurkan bangsa. Walaupun demikian kita yakin bahwa masih banyak diantara manusia Indonesia yang memiliki kebiasaan positif atau memiliki karakter yang baik.

Namun, menurut Myrdal kondisi yang demikian sesungguhnya tidak bisa dikembalikan kepada ciri-ciri jelek yang alamiah yang ada pada bangsa-bangsa itu, melainkan pada struktur tempat mereka berada. Kelemahan itu bukan disebabkan oleh *inherent evil character straits of their peoples*, melainkan merupakan hasil dari sejarah yang cukup panjang (Satjipto Rahardjo, 1986: 67).

Koentjaraningrat, mengakui akan pengaruh dekolonisasi dan penjajahan Belanda telah menjungkir-balikan tatanan dan tata kerja yang mapan untuk digantikan oleh sesuatu yang belum jelas kaidah dan strukturnya dan sebagai akibatnya terjadilah kemunduran-kemunduran dalam prestasi orang Indonesia pasca revolusi, dan hal tersebut yang dapat melemahkan mentalitas bangsa Indonesia (2004: 44). Muchtar Lubis juga mengiyakan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia yang telah dipaparkan di atas disebabkan oleh struktur yang mencekam,

yaitu karena adanya pemerintahan orde baru yang represif dan otoriter (Lubis, 1992; Ramadhan K.H., 1995).

BISA DIUBAH, DAN HARUS BERUBAH

Manusia Indonesia masa depan perlu dipahami bukan sebagai "sudah begitu, mau apalagi", tetapi bisa diubah, melalui strategi kebudayaan, yaitu dengan melakukan perubahan sistem nilai budaya (*culture value sistem*). Misalnya, membuat perbandingan pengalaman negara lain sebagai bahan belajar dan perbaikan internal secara radikal. Misalnya, perbandingan yang disampaikan Huntington dalam artikelnya *Culture Count* di bunga rampai *Culture Matters* (2000: xiii-xvi) yang disuntingnya bersama Lawrence Harrison merangsang kita untuk memiliki keyakinan.

Huntington menggambarkan Ghana pada tahun 1960-an serba sama dengan Korea Selatan. Namun, 30 tahun kemudian, Korsel melampaui Ghana dalam segala hal. Mengapa? Pertanyaan ini dijawab Lawrence Harrison dalam artikel *Promoting Progressive Culture Change* di buku yang sama. Akar masalahnya, Korsel menghidupi dan mengembangkan nilai budaya progresif dengan 10 tipologi manusia, di antaranya berorientasi waktu, kerja keras, hemat, pendidikan, dan menghagai prestasi.

Contoh kedua Jepang, walaupun bencana datang bertubi-tubi dalam bentuk gempa bumi, tsunami, meledaknya reaktor nuklir, mereka mampu mensikapi dengan tenang. Dalam kondisi yang kritis masyarakat Jepang tetap mengedapankan nilai-nilai positif. Dalam acara berita di TV, disampaikan

pengalaman warganegara Indonesia yang tinggal di Jepang, mendapatkan pengalaman menarik ketika gempa datang dan dia sedang berbelanja di mall. Setelah peristiwa gempa telah usai dari pihak penanggung jawab mall segera mengembalikan kartu kredit warganegara Indonesia yang tertinggal. Hal ini merupakan refleksi teguhnya integritas dan kejujuran warga Jepang. Gambaran bahwa di Jepang setiap dompet yang jatuh umumnya akan kembali dalam keadaan utuh. karakter integritas dan kejujuran ini telah melekat dalam masyarakat Jepang karena adanya spirit dan ajaran Bushido yang menekankan karakter amanah, pengasih, santun, sopan, mulia, hormat dan lain-lain (Zaim Uchrowi, 2009: 4).

Jadi, sebenarnya sumber persoalan buruknya kualitas manusia Indonesia adalah adanya nilai-nilai yaitu sistem nilai budaya yang negatif dan penjajahan yang sangat lama yang dialami bangsa Indonesia—meminjam istilah dari Koentjaraningrat. Sistem nilai budaya itu dihidupi dan dikembangkan oleh manusia, yang menjadi subyek atas perilaku dan tindakannya. Sedangkan untuk membangkitkan mental negara terjajah adalah dengan banyak belajar kepada negara-negara lain yang telah maju, sehingga termotivasi untuk meningkatkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik.

PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN SISTEM NILAI BUDAYA

Dalam makalah ini, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi manusia Indonesia, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi khususnya teori sibernetik Talcott Parson dan sistem nilai budaya

(*Culture Value System*) khususnya kerangka mengenai lima dasar nilai budaya manusia Kluckhohn.

Pertama, pendekatan Sosiologi. Pada dasarnya sosiologi melihat manusia dalam serba keterhubungannya dengan manusia atau orang lain. Manusia adalah manusia dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986: 63). Dengan berdasar pada paradigma manusia-masyarakat tersebut dapatlah selanjutnya diketahui aspek-aspek apa saja yang muncul manakala kita membicarakan manusia itu, yaitu: sistem kepribadian yang menyangkut diri manusia itu sendiri, sistem sosial, dan sistem kebudayaan (Talcott Parson, 1951: 6). Dengan demikian, dari segi pemahaman sosiologis, manusia itu senantiasa berada pada posisi didisiplinkan oleh struktur di luar dirinya, apakah itu berupa sistem sosial atautkah kebudayaan. Keadaan yang demikian ini tampak dalam tindakannya. Tindakan manusia ini tidak pernah bisa dilihat terlepas dari jaringan struktur yang merangkumnya. Oleh karena itu, dari sudut pemahaman sosiologi sulit untuk melihat tindakan manusia itu sebagai suatu perbuatan yang spontan, melainkan sebagai hasil perhitungannya dengan struktur yang merangkumnya, baik berupa perbuatan yang sesuai dengan struktur maupun yang menentangnya (Satjipto rahadjo, 1986: 64).

Namun, dalam pandangan sosiologi, konsep manusia dan masyarakat ada dua aliran yang membahasnya. Pertama, yang diwakili oleh Rousseau, dimana bangunan pemikiran Rousseau terhadap manusia didirikan pada tatanan dimana manusia sebagai individu dalam menunjang kemajuan suatu masyarakat. Rousseau berpendirian bahwa *man's impulses, passions dan reasons* yang menentukan masyarakatnya (Loekman Soetrisno, 1986: 56).

Sedangkan aliran yang kedua diwakili oleh Louis De Bonald dan Auguste Comte, dimana Bonald sebaliknya berpendapat bahwa bukan individu-individu yang menunjang kemajuan masyarakat tetapi justru sebaliknya, masyarakatlah yang menentukan individu-individu yang tinggal dalam masyarakat itu (ibid).

Bagi Bonald individu secara sendirian adalah “helpnes” dan “Steril” untuk dapat mengembangkan masyarakatnya. Karena itu individu tidak dapat menciptakan atau menemukan sesuatu. Untuk membuktikannya, menurut teori Bonald manusia sebagai tidak memiliki secara alamiah kata-kata dan *ideas* (T. Botttomore dan Robert Nisbet dalam Loekman Soetrisno, 1986: 56). Bonald berpendapat bahwa hanya dalam masyarakat kita dapati *ideas and symbols*, dan masyarakatlah yang mengkomunikasikan keduanya kepada individu manusia. Ide dapat timbul dalam makhluk yang berpikir tetapi karena berpikir itu sendiri tidak dapat timbul tanpa bahasa maka jelaslah, bahwa kita tidak mungkin memperoleh *the thought of language* tanpa kita memiliki bahasa itu sendiri.

Satjipto Raharjdo (1986: 64) memperjelas keterangan tersebut di atas, bahwa sejak manusia (belajar) menggunakan bahasa sudah tampak fenomena keterikatannya dalam jaringan struktur yang demikian itu. Berbahasa, atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa (bahkan juga dengan menggunakan isyarat lain) menunjukkan keterikatan manusia belaka. Dalam menggunakan serta mengucapkan suatu perkataan kita memperhitungkan kemampuan orang lain untuk menangkap maksud yang kita kirimkan melalui perkataan tersebut. Anak Indonesia akan berbahasa Indonesia, inilah contoh yang paling mudah tentang

perwujudan paradigma manusia —dalam masyarakat atau pemahaman sosiologis tentang manusia itu.

Kemudian Auguste Comte berpendapat bahwa krisis yang dihadapi oleh masyarakat Eropa pada waktu abad pencerahan disebabkan karena individualisme yang melanda masyarakat Eropa melalui gerakan reformasi. Comte melihat bahwa manusia adalah *nonrational*. Oleh karena itu, menurutnya, *individual liberty* justru akan menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam masyarakat manusia tak seorangpun dapat berpendapat lain daripada apa yang telah diputuskan oleh golongan tertinggi masyarakat yaitu *the intellectual-scientific-religious group* (Bottomore dan Robert Nisbet dalam Loekman Soetrisno, 1986: 58). Comte juga berpendapat bahwa Modernisasi berbahaya bagi budaya dan tertib sosial, karena spirit modernisasi menciptakan manusia yang individualistik.

Diantaranya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, juga memberikan dampak perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan teknologi modern dalam masyarakat telah menjepit posisi manusia, sehingga untuk bisa menjelaskan sikap-sikap dan perilakunya, kita memerlukan pengamatan terhadap pengaruhnya yang bekerja atas diri manusia.

Semenjak revolusi industri membebaskan manusia dari kedudukannya yang pasif dan ketergantungannya pada alam, maka secara perlahan manusia masuk ke dalam situasi keterikatan yang lain, bahkan sangat mengekang sifatnya. Alam mengikat manusia dengan cara memangku dan menghidupinya, sedangkan teknologi mencekram manusia dengan memberikan kemudahan-kemudahan,

kenikmatan-kenikmatan tertentu dan secara bersamaan menekan dan merusaknya, hingga manusia tidak mampu lagi menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap teknologi modern.

Masyarakat dan pemerintah sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia, melainkan oleh mesin. Manusia menjadi *bionik*, masyarakat menjadi *sosionik* dan pemerintah menjadi *administronik* (Satjipto Rahardjo, 1986: 69). Ruh kemanusiaan telah hilang dari sisi-sisi kehidupan manusia, yang ada adalah manusia hidup seperti robot yang diatur oleh teknologi. Pergulatan besar yang sedang berlangsung sekarang ini pada hakekatnya adalah bagaimana mengembalikan semuanya kembali ke tangan manusia. Dengan perkataan lain, bagaimana mesin-mesin itu kembali menjadi hamba dan bukan menjadi tuan manusia.

Penilaian negatif manusia Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola kehidupan masyarakat Indonesia yang komunitarian ke arah individualistik. Hal ini mempengaruhi nilai-nilai kepentingan bersama menjadi kepentingan pribadi. Munculnya para koruptor yang menilep uang rakyat demi kemakmuran pribadi, kehidupan permisif di kalangan pemuda demi meraih kenikmatan pribadi, mentalitas menerabas demi mendapatkan keuntungan pribadi dan sebagainya telah menghancurkan sendi-sendi kebersamaan.

Nilai-nilai kejujuran, taat pada aturan, menghargai prestasi kerja, dan sebagainya berawal dari rasa empati kepada kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat sebagai rasa kepemilikan bersama.

Talcott Parson dengan teori struktural fungsionalismenya, menyusun ide tentang teori sibernatika mencoba untuk memberikan jawaban, bahwa sistem sosial merupakan suatu sinergi antara tiga subsistem sosial—sistem sosial, personalitas, dan sistem budaya--yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan (Peter Beilharz: 2002: 292). Ketiga subsistem (pranata) tersebut akan bekerja secara mandiri tetapi saling bergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan & kelestarian sistem sosial secara keseluruhan. Contohnya keterkaitan antara Hukum, agama, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak dapat terpisahkan dan saling berinteraksi

Menurut Talcott Parson (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2004: 121), ada 4 subsistem yang menjalankan fungsi utama dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan sistem “tindakan”, yaitu dengan skema AGIL:

1. Fungsi adaptasi (*Adaptation*) dilaksanakan oleh subsistem ekonomi contoh: melaksanakan produksi & distribusi barang-jasa, dimana jalur produksi dan distribusi barang –jasa untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan seadil-adilnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*) dilaksanakan oleh subsistem politik
contoh: melaksanakan distribusi-distribusi kekuasaan & memonopoli unsur paksaan yg sah (negara). Dalam pembagian kekuasaan ini harus didasarkan kepada etika dan moral politik (*moral excellen*) untuk menghindari kekuasaan absolut dan tindakan korupsi yang dilakukan elit.

3. Fungsi integrasi (*Integration*) dilaksanakan oleh subsistem hukum dengan cara mempertahankan keterpaduan antara komponen yg beda pendapat/ konflik untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial.
4. Fungsi mempertahankan pola & struktur masyarakat (*Lattent pattern maintenance*) dilaksanakan oleh subsistem budaya menangani urusan pemeliharaan nilai - nilai & norma-norma budaya yg berlaku dengan tujuan kelestarian struktur masyarakat dibagi menjadi subsistem keluarga, agama, dan pendidikan.

Dengan demikian, implikasinya, masyarakat akan berkembang dengan baik, jika setiap individu taat kepada norma-norma yang telah disepakati baik dalam norma negara, masyarakat, dan agama. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi dan modernisasi dalam kehidupan masyarakat, Auguste Comte berpendapat bahwa setiap individu membutuhkan agama yang humanis. Yaitu agama yang mampu memberikan dan menunjukkan manusia kepada kehidupan yang manusiawi. Karena agama diturunkan oleh Tuhan untuk kebutuhan hidup manusia, bukan sebaliknya manusia harus menghamba kepada agama. Komarudin Hidayat (2008: 10) menyatakan, jika memang agama diwahyukan untuk manusia, dan bukan manusia untuk agama, maka salah satu ukuran baik-buruknya sikap hidup beragama adalah dengan menggunakan standar dan kategori kemanusiaan. Bukannya ideologi dan sentimen kelompok.

Kedua, pendekatan Sistem Nilai Budaya (*Culture Value System*). Pendekatan ini untuk memperbaiki mentalitas manusia Indonesia yang lemah karena faktor nilai budaya negatif dan *inferior complex* yang diwariskan penjajah

kepada bangsa Indonesia. Koentjaraningrat (2004: 25) menyatakan, sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Untuk menganalisis sistem nilai budaya Koentjaraningrat (2004: 27) menggunakan kerangka Kluckhohn, yaitu lima dasar nilai budaya manusia :

1. Hakekat hidup manusia. Ada kebudayaan yang menganggap hakekat hidup manusia adalah buruk dan menyedihkan, namun manusia dapat berusaha untuk mengubah dirinya dari kondisi buruk ke arah kondisi yang lebih baik dan bahagia.
2. Karya manusia dalam kebudayaan pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga eksistensi kehidupannya, memberikan status dan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, dan sebagai usaha untuk menghasilkan produk yang lebih banyak lagi
3. Kedudukan manusia dengan ruang waktu berinteraksi dengan kehidupan masa lalu sebagai cermin untuk memandangi kehidupan ke masa depan. Sehingga manusia mampu untuk menghargai dan menggunakan ruang waktunya untuk kemajuan hidupnya.
4. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya, agar terjalin secara harmonis, maka manusia harus mampu mensikapi alam dengan bijaksana. Melakukan eksploitasi alam tanpa melupakan upaya-upaya pemeliharaan dan pelestariannya. Agar alam tidak “marah” dan dapat berlanjut kepada anak cucu kelak dikemudian hari.

5. Hubungan manusia dengan sesamanya dapat tetap terpelihara, apabila mereka mampu bekerja sama dan saling pengertian. Dengan cara seperti itulah kehidupan masyarakat dapat terpelihara tertib sosialnya yang diikat dengan sistem sosial dan sistem budaya.

Selain itu, untuk menjawab persoalan kualitas manusia Indonesia, Muchtar Lubis juga menyarankan agar melakukan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak berhenti pada 6 (enam) karakter negatif yang sudah dipaparkan di atas. Dimana masih banyak budaya kebaikan yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi karakter positif dan berjalan di tengah-tengah masyarakat, misalnya budaya gotong royong, kasih orang tua kepada anak dan sebaliknya, hati yg damai/ lembut, bersabar, dan cepat belajar. Walaupun untuk kehidupan masyarakat di perkotaan sepertinya budaya positif tersebut mulai luntur dan tidak sedikit yang meninggalkannya. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya positif tersebut. Dan lembaga pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat menjadi sarana yang paling ideal untuk melaksanakannya.

Sedangkan nilai-nilai negatif yang berasal dari bangsa asing baik yang di bawa pada masa penjajahan maupun karena adanya dampak globalisasi, maka pemerintah harus membuat peraturan yang membatasi efek globalisasi tersebut walaupun tidak bisa sama sekali menghindarinya dan mengganti budaya-budaya penjajah dengan budaya *genuine* Indonesia yang positif, serta disusunnya kurikulum berbasis budaya lokal untuk pendidikan.

Misalnya, untuk merubah kebiasaan masyarakat yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan, maka pemerintah harus membuat undang-undang yang ketat dengan hukuman tegas bagi yang melanggar. Kemudian menghilangkan sapaan-sapaan penjajah yang tidak sesuai budaya bangsa dengan mengimplementasikan karakter positif dari budaya bangsa sendiri dan membangkitkan kembali tradisi-tradisi besar dan mengembangkan kesenian secara struktural maupun kultural.

Namun, dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, usaha perbaikan ke arah yang positif pasti akan menemui berbagai macam hambatan. Misalnya, jumlah penduduk yang sekarang mencapai lebih dari 200 juta menjadi kendala tersendiri, jika pemerintah tidak mampu menekan pertumbuhannya. Dimana dengan besarnya jumlah penduduk dipastikan kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan juga akan semakin meningkat. Hal ini jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerawanan pangan, persaingan memperoleh pekerjaan semakin meningkat, lahan pertanian banyak berubah menjadi tempat hunian, keberadaan hutan semakin menyempit, dan berdampak kepada semakin meningkatnya problem penumpukan sampah, banjir, bencana alam, kemiskinan dan sebagainya.

Belum lagi masalah karakter negatif bangsa yang sangat sulit dirubah kalau hanya mengandalkan kesadaran warga negara. Kasus korupsi yang tidak pernah habis-habisnya, peredaran dan penggunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, tawuran, kriminalitas dan sebagainya telah membawa masyarakat ke jurang dekadensi moral yang lebih parah lagi.

Jika ini benar-benar terjadi, maka kualitas atau mentalitas manusia Indonesia akan semakin memburuk, dan pada akhirnya bangsa ini akan semakin berat menanggung beban segala permasalahannya. Dalam kondisi seperti ini, bangsa yang bernama Indonesia akan menuju kebangkrutan atau bahkan yang lebih ekstrim akan menuju kehancurannya ?. *Wallahu a'lam bishawab.*

PENUTUP

Pengenalan manusia Indonesia dengan menonjolkan sisi-sisi negatifnya justru amat relevan, konstruktif, dan produktif untuk membangun manusia Indonesia yang postmo (JB Mangunwijaya), yang *well informed* (Soedjatmoko), yang berpengharapan—dalam sisi spirituil (Mukti Ali), yang mandiri dan tahu batas kemampuan diri (Slamet Iman Santoso), yang tidak gagap teknologi (BJ Habibie).

Kata kunci mengatasi keterpurukan Indonesia adalah *culture matters*, kata Jakob Oetama dalam pidato peluncuran Koentjaraningrat Memorial Lecture I, 15 Maret 2004. Tipologi manusia budaya statis perlu diubah menjadi tipologi manusia berbudaya progresif.

Walaupun teori Talcott Parson dan Kluckhohn mungkin tidak sepenuhnya dapat menjawab permasalahan karakter dan mentalitas bangsa Indonesia, namun setidaknya ada jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai landasan. Dan yang paling penting adalah solusi itu sebenarnya dapat digali melalui kebudayaan lokal yang lebih *genuine* dan tidak asing bagi pengembangan manusia Indonesia ke depan ke arah yang lebih baik dan bermartabat sesuai dengan kepribadian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beilharz, Peter. 2002. *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington (ed.). 2000. *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books
- Hidayat, Komarudin. 2008. *The Wisdom of Life, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*. Jakarta: Kompas
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Loekman Soetrisno. 1986. *Konsep Manusia dalam Sosiologi dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Erlangga
- Lubis, Muchtar. 1992. *Budaya, Masyarakat, Dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pelly, Usman & Asih Menanti. 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta. Dirjen Dikti Depdiknas
- Parson, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press.
- Ramadhan K.H. (Penyunting). 1995. *Muchtar Lubis Bicara Lurus, Menjawab Pertanyaan Wartawan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Gambaran Tentang Manusia dari Sudut Sosiologi dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Erlangga
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugiarto, Ryan. 2009. *55 Kebiasaan Kecil yang Menghancurkan Bangsa*. Yogyakarta: Pinus Book publishing
- Uchrowi, Zaim, Harian Republika. "Bushido", Jum'at, 13 November 2009